



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2022

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB BANYUASIN, KEDONDONG RAYE
KAB. BANYUASIN PROV. SUMSEL

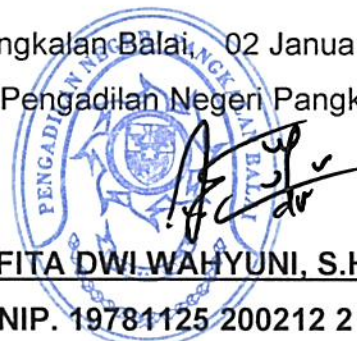
KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2022 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kami dalam menjalankan tugas pokok selama tahun 2022. Laporan ini disusun sesuai dengan Sistematika Penulisan Laporan yang ditentukan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Nomor 2876/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 dan juga surat dari Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : W6-U/4833/OT.01.2/XII/2022 tanggal : 20 Desember 2022 Perihal : Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selama Tahun 2022, yaitu keadaan organisasi peradilan secara teknis maupun non teknis, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini tentu saja masih jauh dari sempurna, karenanya kritik, saran dan koreksi sangat kami harapkan.

Pangkalan Balai, 02 Januari 2022

☞ Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.

NIP. 19781125 200212 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum.....	4
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	4
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	5
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	5
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	5
B. Penyelesaian Perkara	6
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus.....	6
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.....	7
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK.....	7
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi.....	8
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.....	8
C. Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikasi Iso Pengadilan)	8
1. Posbakum.....	8
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.....	9
3. Perkara Prodeo.....	9
BAB III Sumber Daya Manusia	10
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan	10
Profil Sumber Daya Manusia.....	11
A. Mutasi	16
B. Promosi	16
C. Pensiun	17
D. Diklat	17
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana & TI	22
A. Pengelolaan Keuangan.....	22
1. Dipa Badan Urusan Administrasi	22
2. Dipa Dirjen Badilum.....	23
B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana.....	24

	1. Gedung Dan Bangunan.....	24
	2. Rumah Dinas.....	27
	3. Kendaraan Bermotor.....	27
	4. Fasilitas Perkantoran	27
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	27
	1. Implementasi e-Court.....	28
	2. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.....	29
BAB V	Peningkatan Pelayanan Publik	30
	A. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	30
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	31
	C. Inovasi Pelayanan Publik.....	34
BAB VI	Pengawasan.....	38
	A. Internal.....	39
	B. Evaluasi.....	41
BAB VII	Penutup.....	42
	A. Kesimpulan.....	42
	B. Rekomendasi.....	42

BAB I PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan yang semakin luas dan kompleks.

Setelah diberlakukannya Undang-undang No.4 Tahun 2004 dan Keppres No. 21 Tahun 2004, Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan tingkat pertama memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih luas yang menuntut perhatian yang lebih besar terhadap tata cara dan pelaksanaan administrasi peradilan, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara, tetapi juga administrasi umum yang akan memengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Terkait hal tersebut di atas administrasi peradilan dapat dibedakan jenisnya dan dipisahkan penanganannya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi masyarakat para pencari keadilan dengan cakupan wilayah hukum Kabupaten Banyuasin.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memiliki visi **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Agung”**. Dalam upaya untuk

mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menyusun beberapa misi antara lain :

1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat.
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Yang Efektif dan Efisien.
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Yang Efektif dan Efisien.
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Standar.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan dipertanggung-jawabkan secara periodik yang dikenal pada tahun yang sudah berjalan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan penjabaran dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama, Dengan demikian untuk peningkatan kinerja badan Peradilan umum perlu ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang Handal dan tepat guna dan juga mempunyai kualitas keterampilan individu (*skill individual*) yang baik, sehingga jalannya suatu organisasi dapat juga selaras dan berkesinambungan sesuai dengan pedoman yang telah menjadi Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

Dalam usaha pencapaian tegaknya hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, maka dibuatlah program kerja yang mencakup hal-hal yang bersifat teknis peradilan dan juga hal-hal

yang bersifat non teknis misalnya sarana dan prasarana demi menunjang visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terangkum dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

BAB II

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Perkara yang telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II terdiri dari Perkara Pidana dan Perkara Perdata. Jumlah Perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2022 sejak bulan Januari sampai bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut :

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara tingkat pertama per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI PERKARA	SISA TAHUN 2021	PERKARA MASUK TAHUN 2022	PERKARA YANG PUTUS/ CABUT TAHUN 2022	SISA PERKARA TAHUN 2022
1.	Pidana Biasa	96	441	456	81
2.	Pidana Anak	-	15	13	2
3.	Pidana Singkat	-	5	5	-
4.	Pidana Cepat	-	14	14	-
5.	Praperadilan	-	9	8	1
6.	Lalulintas	-	2922	2922	-
7.	Perdata Gugatan	14	45	46	13
8.	Perdata Bantahan	-	-	-	-
9.	Perdata Gugatan Sederhana	2	2	4	-
10.	Perdata Permohonan	1	19	20	-

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Keadaan perkara tingkat banding per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI PERKARA	MENGAJUKAN BANDING	PUTUS	DICABUT	BELUM PUTUS
1.	Pidana Biasa	25	15	2	8
2.	Pidana Anak	-	-	-	-
3.	Perdata Gugatan	10	8	-	2

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Keadaan perkara tingkat kasasi per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI PERKARA	MENGAJUKAN KASASI	PUTUS	DICABUT	BELUM PUTUS
1.	Pidana Biasa	11	8	1	2
2.	Pidana Anak	-	-	-	-
3.	Perdata Gugatan	7	-	1	6

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Keadaan perkara tingkat peninjauan kembali per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI PERKARA	MENGAJUKAN PK	PUTUS	DICABUT	BELUM PUTUS
1.	Pidana Biasa	2	1	-	1
2.	Pidana Anak	-	-	-	-
3.	Perdata Gugatan	1	-	-	1

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara tahun 2021 yang diputus pada tahun 2022 sebagai berikut :

a. Perkara Pidana

	KLASIFIKASI PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2021	PUTUS	SISA PERKARA TAHUN 2022
1.	Pidana Biasa	96	96	-
2.	Pidana Anak	-	-	-
3.	Pidana Singkat	-	-	-
4.	Pidana Cepat	-	-	-
5.	Praperadilan	-	-	-
6.	Lalulintas	-	-	-

b. Perkara Perdata

NO	KLASIFIKASI PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2021	PUTUS	SISA PERKARA TAHUN 2022
1.	Perdata Gugatan	14	14	-
2.	Perdata Gugatan Sederhana	2	2	-
3.	Perdata Permohonan	1	1	-

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

a. Perkara Pidana

NO	KLASIFIKASI PERKARA	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU
1.	Pidana Biasa	441	360
2.	Pidana Anak	15	13
3.	Pidana Singkat	5	5
4.	Pidana Cepat	14	14
5.	Praperadilan	9	8
6.	Lalulintas	2922	2922

b. Perkara Perdata

NO	KLASIFIKASI PERKARA	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU
1.	Perdata Gugatan	45	32
2.	Perdata Gugatan Sederhana	2	2
3.	Perdata Permohonan	19	19

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Pk

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2022 sebagai berikut :

NO	KLASIFIKASI PERKARA	YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM		
		BANDING	KASASI	PK
1.	Pidana Biasa	416	430	439
2.	Pidana Anak	-	-	-
3.	Perdata Gugatan	35	38	44

4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI

Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di mediasi tahun 2022 sebagai berikut :

NO	KLASIFIKASI PERKARA	PERKARA MASUK	PERKARA YANG BERHASIL DI MEDIASI
1.	Perdata Gugatan	45	-

5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui diversi tahun 2022 sebagai berikut :

NO	KLASIFIKASI PERKARA	PERKARA MASUK	PERKARA YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI
1.	Pidana Anak	15	-

C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

1. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2022 mendapatkan anggaran untuk menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum dengan anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) untuk 240 Jam Pelayanan. Untuk melaksanakan Program tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menggandeng Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Bhakti Pertiwi.

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan satker yang baru dibentuk pada tahun 2018, sehingga Pengadilan Negeri Pangkalan Balai belum dapat melaksanakan kegiatan persidangan keliling dikarenakan keterbatasan anggaran.

3. Perkara Prodeo

Salah satu bentuk layanan hukum yang diberikan Pengadilan kepada masyarakat yang kurang mampu adalah perkara prodeo. Prodeo adalah pembebasan biaya perkara bagi masyarakat kurang mampu sehingga dalam berperkara di pengadilan, masyarakat kurang mampu tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Pada pelaksanaannya prodeo terdiri dari prodeo murni dan prodeo menggunakan anggaran APBN. Pada tahun 2022 tidak ada permohonan perkara secara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/ golongan/ pendidikan

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai hingga laporan ini dibuat berjumlah 44 (Empat Puluh Empat) Orang personil yang terdiri dari 7 (Tujuh) Orang Hakim, 8 (Delapan) Orang Pejabat Struktural, 10 (Sepuluh) Orang Pejabat Fungsional, 11 (Sebelas) Orang Pelaksana dan 8 (Delapan) Orang Pegawai PPNPN. Berikut ini statistik pegawai pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2022:

NO	NAMA JABATAN	JLH (ORG)	PENDIDIKAN							GOLONGAN			
			SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
1	Ketua	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Wakil Ketua	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
3	Hakim	5	-	-	-	-	2	3	-	-	-	5	-
4	Panitera	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
5	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
6	Panmud Hukum	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
7	Panmud Perdata	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
8	Panmud Pidana	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
9	Ka.Sub.Bag Kepegawaian dan Ortala	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
10	Ka.Sub.Bag Umum dan Keuangan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
11	Ka.Sub.Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
12	Panitera Pengganti	7	-	-	-	-	3	4	-	-	-	7	-

NO	NAMA JABATAN	JLH (ORG)	PENDIDIKAN							GOLONGAN			
			SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
13	Jurusita	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	-
14	Jurusita Pengganti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pelaksana	11	-	-	3	4	4	-	-	-	6	5	-
Jumlah		36	-	-	4	6	13	13	-	-	6	28	2

Profil Sumber Daya Manusia

a. Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil

Berikut ini jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2022:

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG	KET
1	NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.	Ketua	Pembina	IV/a	
2	FITRI AGUSTINA, S.H.	Wakil Ketua	Pembina	IV/a	
3	HARI MUKTIYONO, S.H.	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tk.I	III/b	
4	SYARIFA YANA, S.H., M.H.	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tk.I	III/b	
5	AGEWINA, S.H., M.H.	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tk.I	III/b	
6	ERWIN TRI SURYA ANANDAR, S.H.	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tk.I	III/b	
7	AYU CAHYANI SIRAIT, S.H., M.H.	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tk.I	III/b	
8	WARNO, S.H.	Panitera	Penata Tk.I	III/d	
9	ENDANG EFENDI, S.E., M.M.	Sekretaris	Penata Tk.I	III/d	
10	A HAIRUN YULASNI, S.H.	Panitera Muda Hukum	Penata Tk.I	III/d	
11	KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Penata Tk.I	III/d	
12	ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Penata	III/c	

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG	KET
13	DWI INDAH ROSALINA, S.H, M.H.	Kepala Sub Bagian	Penata	III/c	
14	MUHAMMAD IMAN SEPTIAN, S.Ip.	Kepala Sub Bagian	Penata	III/c	
15	RAHMAT JUNIANSYAH	Kepala Sub Bagian	Penata Muda Tk.I	III/b	
16	ISNATA TAKASURI, S.H	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	
17	WENNY PUSPITA SARI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
18	AL IHSAN ALAMSYUR, S.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
19	BRENDY SUTRA, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
20	YUDI ADRIAN SAPUTRA, S.H	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
21	MATHYAS ADINATA, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
22	HIKMAWATI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
23	M. BUDIANTO, S.E	Jurusita	Penata Muda Tk. I	III/b	
24	MELLY NORVIANA, A.Md	Jurusita	Penata Muda	III/a	
25	MARDHIYAN SAPUTRA, A.Md.	Jurusita	Penata Muda	III/a	
26	ENDANG AZHARI	Bendahara Penerimaan	Penata Muda Tk.I	III/b	
27	MUHAMMAD BUDI KURNIAWAN, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	
28	MUTIARA SAPUTRI, S.E	Analisis SDM Aparatur	Penata Muda	III/a	
29	JIHAN PUTRI ZUZANGGI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a	
30	ZULPAN ARYANTO	Pengadministrasi Persuratan	Pengatur Tk.I	II/d	
31	ERA USTHI ANGGRAINI	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Pengatur Tk.I	II/d	
32	DESTI DWI AMANDA, A.Md.	Pengelola Perkara	Pengatur	II/c	
33	DEA ANGGITA, A.Md.	Bendahara Pengeluaran	Pengatur	II/c	
34	ADE KURNIAWAN, A.MD.	Pengelola Sistem dan Jaringan	Pengatur	II/c	
35	WAHIDA SOPHIE HIDAYANTI, S.H.	CPNS	Penata Muda	III/a	
36	EUNIKE MAYERNI BATUBARA , A.Md. AB	CPNS	Pengatur	II/c	

b. Sumber Daya Manusia Tenaga Honorer (PPNPN)

Berikut ini jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Honorer (PPNPN) yang ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2021 :

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	ERWANZA	Pengamanan	
2	FAISAL RIFA'I, A.Md	Pengemudi	
3	ABDUL HADI	Pramubakti	
4	M. FADHIEL YUSUF, S.H.	Pramubakti	
5	M. RAMADHONI, S.H.	Pengamanan	
6	CITRA PUSPITA SARI, S.T.	Pramubakti	
7	TITAH ADELIA ROSY, S.H.	Pramubakti	
8	RISKA YANTI, S.H.	Pramubakti	

c. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Hakim (Ketua / Wakil)	2	5	7
2	Panitera	1	-	1
3	Panitera Muda Hukum	1	-	1
4	Panitera Muda Perdata	1	-	1
5	Panitera Muda Pidana	1	-	1
6	Panitera Pengganti	4	3	7
7	Jurusita	2	1	3
Jumlah		12	9	21

d. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris	1	-	1
2	Kasubag Umum dan Keuangan	1	-	1
3	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	-	1	1
4	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	-	1
5	Pelaksana	4	7	11
6	Tenaga Honorer (PPNPN)	5	3	8
Jumlah		12	11	23

e. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Golongan IV	-	2	2
2	Golongan III	17	10	27
3	Golongan II	2	3	5
4	Golongan I	-	-	-
5	CPNS	-	2	2
6	Tenaga Honorer (PPNPN)	5	3	8
Jumlah		24	20	44

Golongan IV

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
4	Pembina Tk. I (IV/b)	-	-	-
5	Pembina (IV/a)	-	2	2
Jumlah		-	2	2

Golongan III

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Penata Tk.I (III/d)	4	1	5
2	Penata (III/c)	6	3	9
3	Penata Muda Tk. (III/b)	5	3	8
4	Penata Muda (III/a)	2	3	5
5	CPNS	-	1	1
Jumlah		17	11	28

Golongan II

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Pengatur Tk.I (II/d)	1	1	2
2	Pengatur (II/c)	1	2	3
3	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-
4	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
5	CPNS	-	1	1
Jumlah		2	4	6

Golongan I

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Juru Tk.I (I/d)	-	-	-
2	Juru (I/c)	-	-	-
3	Juru Muda Tk.I (I/b)	-	-	-
4	Juru Muda (I/a)	-	-	-
Jumlah		-	-	-

A. MUTASI

Selama tahun 2022 terdapat beberapa mutasi Hakim dan pegawai baik mutasi masuk maupun mutasi keluar, mutasi tersebut antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET.
1	FITRI AGUSTINA, S.H.	Wakil Ketua PN Sekayu	Wakil Ketua PN Pangkalan Balai	Mutasi Masuk
2	HARI MUKTIYONO, S.H.	Hakim PN Tanjung Pati	Hakim PN Pangkalan Balai	Mutasi Masuk
3	WARNO, S.H.	Panitera PN Pacitan	Panitera PN Pangkalan Balai	Mutasi Masuk
4	AL IHSAN ALAMSYUR, S.H.	Panitera Pengganti PN Muara Enim	Panitera Pengganti PN Pangkalan Balai	Mutasi Masuk
5	FITRIANI, S.H.	Panitera Pengganti PN Pangkalan Balai	Panitera Pengganti PN Tais	Mutasi Keluar
6	MELLY NORVIANA, A.Md	Jurusita PN Sekayu	Jurusita PN Pangkalan Balai	Mutasi Masuk

B. PROMOSI

Selama tahun 2022 terdapat beberapa Hakim dan pegawai yang promosi jabatan, antara lain sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET.
1	SILVI ARIANI, S.H., M.H.	Ketua PN Pangkalan Balai	Wakil Ketua PN Sekayu	Promosi
2	YUSUF, S.H.	Panitera PN Pangkalan Balai	Panitera Pengganti PT Palembang	Promosi

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET
3	SUWARMAN, S.H., M.H.	Panitera Pengganti PN Pangkalan Balai	Panitera Muda Hukum PN Pagaralam	Promosi
4	HIKMAWATI, S.H., M.H.	Jurusita Pengganti PN Prabumulih	Panitera Pengganti PN Pangkalan Balai	Promosi
5	M.BUDIANTO, S.E.	Jurusita Pengganti PN Pangkalan Balai	Jurusita PN Pangkalan Balai	Promosi

C. PENSIUN

Dalam kurun waktu dari Januari s.d. Desember 2021 tidak ada baik itu hakim maupun non-hakim yang pensiun.

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT GOL/RUANG	KET.
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

D. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pada tahun 2022 terdapat orang yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan diantaranya;

No.	Nama	Diklat Yang Diikuti	Tanggal Kegiatan
1	2	3	4
1.	A. HAIRUN YULASNI, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat PP 4 Peradilan Seluruh Indonesia	15 Maret 2022 s.d 17 Maret 2022
2.	ARIF BUDIMAN JAYA, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat PP 4 Peradilan Seluruh Indonesia	15 Maret 2022 s.d 17 Maret 2022
3.	AL IHSAN ALMSYUR, S.H.	Pelatihan Singkat PP 4 Peradilan Seluruh Indonesia	15 Maret 2022 s.d 17 Maret 2022
4.	BRENDY SUTRA, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat PP 4 Peradilan	15 Maret 2022 s.d

		Seluruh Indonesia	17 Maret 2022
5.	KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.	Pelatihan Singkat PP 4 Peradilan Seluruh Indonesia	29 Maret 2022 s.d 31 Maret 2022
6.	ISNATA TAKASURI, S.H.	Pelatihan Singkat PP 4 Peradilan Seluruh Indonesia	29 Maret 2022 s.d 31 Maret 2022
7.	MATHYAS ADINATA, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat PP 4 Peradilan Seluruh Indonesia	29 Maret 2022 s.d 31 Maret 2022
8.	YUDI ADRIAN SAPUTRA, S.H.	Pelatihan Singkat PP 4 Peradilan Seluruh Indonesia	29 Maret 2022 s.d 31 Maret 2022
9.	WARNO, S.H.	Pelatihan Singkat PP 4 Peradilan Seluruh Indonesia	29 Maret 2022 s.d 31 Maret 2022
10.	WENNY PUSPITA SARI, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat PP 4 Peradilan Seluruh Indonesia	29 Maret 2022 s.d 31 Maret 2022
11.	SUWARMAN, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat PP 4 Peradilan Seluruh Indonesia	29 Maret 2022 s.d 31 Maret 2022
12.	ERWIN TRI SURYA ANANDAR, S.H.	Pelatihan Singkat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Elementary bagi Hakim Peradilan Umum Wilayah Hukum PT Palembang	15 Maret 2022 s.d 19 Maret 2022
13.	DEA ANGGITA, A.Md	E-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan IV TA. 2022	21 Maret 2022 s.d 29 Maret 2022
14.	WARNO, S.H.	Bimtek Aparatur Sipil Negara terkait Percepatan Penyelesaian Perkara pada PT Palembang & PN Se-Sumsel	28 Maret 2022 s.d 30 Maret 2022
15.	KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.	Bimtek Aparatur Sipil Negara terkait Percepatan Penyelesaian Perkara pada PT Palembang & PN Se-Sumsel	28 Maret 2022 s.d 30 Maret 2022
16.	ARIF BUDIMAN JAYA, S.H., M.H.	Bimtek Aparatur Sipil Negara terkait Percepatan Penyelesaian Perkara pada PT Palembang & PN Se-Sumsel	28 Maret 2022 s.d 30 Maret 2022
17.	JIHAN PUTRI ZUZANGGI, S.H.	E-Learning Bendahara Penerimaan	04 April 2022 s.d

		Angkatan II	11 April 2022
18.	DESTI DWI ANANDA, A.Md	E-Learning Bendahara Penerimaan Angkatan II	04 April 2022 s.d 11 April 2022
19.	JIHAN PUTRI ZUZANGGI, S.H.	Pelatihan ECSTC Preparation Test Batch 2 secara online	14 April 2022 s.d 22 April 2022
20.	DWI INDAH ROSALINA, S.H., M.H.	Pelatihan Online Manajemen ASN Angkatan 1 s.d. 5 Tahun 2022	27 Juli 2022 s.d 1 Agustus 2022
21.	NOFITA DWI WAHYUNI., S.H., M.H.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XVII	21 Agustus 2022 s.d 30 Agustus 2022
22.	WAHIDA SOPHIE HIDAYATI, S.H.	Latsar CPNS secara Blended Learning kerjasama dengan BPSDMD Prov Sumsel Gol II & III Angkatan VIII, IX, XII, XIII, XIV Tahun 2022	02 September 2022 s.d 19 November 2022
23.	EUNIKE MAYERNI BATUBARA, A.Md. AB.	Latsar CPNS secara Blended Learning kerjasama dengan BPSDMD Prov Sumsel Gol II & III Angkatan VIII, IX, XII, XIII, XIV Tahun 2022	02 September 2022 s.d 19 November 2022
24.	ADE KURNIAWAN, A.Md	E-Learning Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu Angkatan IX TA. 2022	22 Agustus 2022 s.d 30 Agustus 2022
25.	RAHMAT JUNIANSYAH	Bimtek Bidang Kesekretariatan di Wilayah Hukum PT Palembang	24 Agustus 2022 s.d 26 Agustus 2022
26.	M.IMAN SEPTIAN, S.IP	Bimtek Bidang Kesekretariatan di Wilayah Hukum PT Palembang	24 Agustus 2022 s.d 26 Agustus 2022
27.	DWI INDAH ROSALINA. S.H., M.H.	Bimtek Bidang Kesekretariatan di Wilayah Hukum PT Palembang	24 Agustus 2022 s.d 26 Agustus 2022
28.	DEA ANGGITA, A.Md	Bimtek Bidang Kesekretariatan di Wilayah Hukum PT Palembang	24 Agustus 2022 s.d 26 Agustus 2022
29.	ADE KURNIAWAN, A.Md	Bimtek Bidang Kesekretariatan di Wilayah Hukum PT Palembang	24 Agustus 2022 s.d 26 Agustus 2022
30.	ENDANG AZHARI	Bimtek Rekonsiliasi melalui Monsakti dalam Rangka Meningkatkan kualitas Laporan	30 Agustus 2022

		Keuangan Tingkat Kuasa BUN	
31.	ADE KURNIAWAN, A.Md	Bimtek Rekonsiliasi melalui Monsakti dalam Rangka Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN	30 Agustus 2022
32.	SYARIFA YANA, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat Penghapusan Diskriminasi Gender terhadap Perempuan & Meningkatkan Akses perempuan terhadap keadilan Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Gelombang I Tahun 2022	18 September 2022 s.d 21 September 2022
33.	WARNO, S.H.	Pelatihan Online Manajemen Resiko Organisasi Sektor Publik Angkatan 3	24 Oktober 2022 s.d 28 Oktober 2022
34.	NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan XXIV Bagi Hakim Karier Tingkat Pertama Seluruh Indonesia Tahun 2022	28 November 2022 s.d 10 Desember 2022
35.	SILVI ARIANI, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat Identifikasi & Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Bagi Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum & Peradilan TUN Tahun 2022	05 Desember 2022
36.	HARI MUKTIYONO, S.H.	Pelatihan Singkat Identifikasi & Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Bagi Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum & Peradilan TUN Tahun 2022	05 Desember 2022
37.	WARNO, S.H.	Pelatihan Singkat Identifikasi & Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Bagi Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum & Peradilan TUN Tahun 2022	05 Desember 2022

38.	KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.	Pelatihan Singkat Identifikasi & Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Bagi Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum & Peradilan TUN Tahun 2022	05 Desember 2022
39.	ARIF BUDIMAN JAYA, S.H., M.H.	Pelatihan Singkat Identifikasi & Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Bagi Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum & Peradilan TUN Tahun 2022	05 Desember 2022
40.	WAHIDA SOPHIE HIDAYATI, S.H.	Pelatihan Singkat Identifikasi & Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Bagi Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum & Peradilan TUN Tahun 2022	05 Desember 2022
41.	M.BUDIANTO, S.E.	Pelatihan Singkat Identifikasi & Penomoran Perkara Lingkungan Hidup Bagi Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Peradilan Umum & Peradilan TUN Tahun 2022	05 Desember 2022

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA & PRASARANA
SERTA TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Anggaran keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau sering dikenal dengan DIPA. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2022 memiliki 2 DIPA, yakni DIPA Badan Urusan Administrasi dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.401909/2022 dengan total pagu Dipa Awal sebesar Rp. 4.986.169.000,- (Empat milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang mana setelah di revisi menjadi Rp. 9.319.369.000,- (Sembilan milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : SP DIPA-005.03.2.402017/2022 dengan total pagu awal sebesar Rp. 73.905.000 (Tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dan setelah direvisi menjadi Rp.136.228.000,-(Seratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01)-Revisi Ke-7

DIPA Badan Urusan Administrasi meliputi anggaran belanja gaji pegawai, belanja barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional dan belanja modal. Berikut disajikan secara rinci anggaran pada tahun 2022.

- Realisasi Anggaran DIPA 01

No	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
	EBA.994	Layanan Perkantoran				
1.	001	Gaji dan Tunjangan	3.699.977.000	3.385.916.263	260.259.737	92.97
2.	002	Operasional dan	1.395.592.000	1.159.871.075	54.733.025	96.08

No	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
		Pemeliharaan Kantor				
	EBA.962	Layanan Umum				
3.	051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	5.000.000	3.925.000	1.075.000	78.50
	EBB.951	Layanan Sarana Internal				
4.	052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	10.000.000	10.000.000	0	100
	EBB.971	Layanan Prasarana Internal				
5.	051	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	4.208.800.000	4.068.431.072	140.368.928	96.66
Total			9.319.369.000	8.862.932.310	456.436.690	95.10

2. DIPA Dirjen Badilum (03)-Revisi Ke-02

DIPA Dirjen Badilum meliputi anggaran belanja Pos Bantuan Hukum dan Penyelesaian perkara di tingkat pertama. Berikut disajikan secara rinci anggaran pada tahun 2022.

- Realisasi Anggaran DIPA 03

No	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
	QBA.032	Pos Bantuan Hukum				
1.	051	Pos Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000	0	100
	BCA.U03	Perkara Hukum Perseorangan				
2.	051	Pendaftaran Berkas Perkara	27.195.000	26.184.500	1.010.500	96.28
3.	052	Penetapan Hari Sidang	22.500.000	17.750.000	4.750.000	78.89
4.	053	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	31.000.000	30.038.000	962.000	96.90
5.	055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada	15.500.000	13.874.000	1.626.000	89.51

No	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
		JPU dan terdakwa				
6.	056	Minutasi/Upaya Hukum	12.173.000	12.000.000	173.000	98.58
7.	057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	1.810.000	1.689.160	120.840	93.32
8.	058	Penanganan Perkara Kasasi & PK di Pengadilan Tingkat Pertama	2.050.000	1.975.640	74.360	96.37
Total			136.228.000	127.511.300	8.716.700	93.60

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana adalah kegiatan mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan dan memanfaatkan sarana dan prasarana agar tetap dalam kondisi yang baik sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai meliputi Gedung dan Bangunan, Tanah, Kendaraan Bermotor serta fasilitas perkantoran.

1. Gedung dan Bangunan

No.	Jenis Sarana	Uraian	Keterangan
1	GEDUNG KANTOR	Tanah Gedung Kantor	Sertifikat
		Bangunan Gedung Kantor	Sudah Menempati Kantor Baru Per 05 Desember 2022
2	RUANG KERJA	Ruang Ketua	Ada
		Ruang Wakil Ketua	Ada
		Ruang Hakim	Ada
		Ruang Panitera	Ada
		Ruang Panitera Muda	Ada
		Ruang Panitera Pengganti	Ada
		Ruang Juru Sita dan Juru Sita Pengganti	Ada
		Ruang Sekretaris	Ada
		Ruang Kepala Sub Bagian	Ada

No.	Jenis Sarana	Uraian	Keterangan
		Ruang Jaksa Penuntut Umum	Ada
		Ruang Penasihat Hukum	Ada
		Ruang Rapat	Ada
		Ruang Perpustakaan	Ada
		Ruang Arsip	Ada
		Ruang Gudang	Ada
		Ruang Server	Ada
		Ruang Toilet Pegawai	Ada
		Ruang Toilet Pegawai Hakim	Ada
		Ruang Tamu Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pada Bagian Depan Gedung - Ruangan Terbuka (Tidak Tertutup) - Sesuai dengan SE Dirjen Badilum Nomor 1/DJU/SE/V/2012 Tentang Penyediaan Ruang Tamu Terbuka Pada Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia
3	SARANA LINGKUNGAN GEDUNG KANTOR	Pagar Keliling	Ada
		Pos Jaga	Tidak Ada
		Tempat Parkir Kendaraan	Ada
		Akses Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengerasan Jalan Menggunakan Cor Beton
		Taman	<ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan Bunga dan Pohon Hias
		Akses Difabel	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat jalur Khusus untuk penyandang disabilitas - Terdapat Step (Ram) pada Lobi Kantor untuk penyandang disabilitas yang menggunakan Kursi Roda
		Kamera Keamanan (CCTV)	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 32 Titik Kamera CCTV <i>Full HD</i>
4	RUANG PELAYANAN	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	<ul style="list-style-type: none"> - Terletak di Bagian Gedung Kantor (Lobi Gedung) - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Dilengkapi Dengan Media Informasi - Dilengkapi Dengan Komputer Untuk Proses Pelayanan - Dilengkapi Dengan Kursi Tunggu - Dilengkapi Dengan WIFI untuk Pengguna

No.	Jenis Sarana	Uraian	Keterangan
			Layanan - Dilengkapi Dengan <i>Charger Box</i>
		Ruang Sidang	- Terdapat 4 Ruang Sidang (Ruang Sidang Utama, Ruang Sidang Pidana, Ruang Sidang Perdata dan Ruang Sidang Anak - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) Central. - Dilengkapi Dengan sarana dan Prasarana Ruang Sidang Seperti mebel, Bendera, Lambang Garuda, Palu dan Lain-lain - Dilengkapi dengan Peralatan Sidang Online
		Ruang Tunggu Sidang	- Dilengkapi Dengan Televisi - Dilengkapi Dengan Media Informasi - Dilengkapi Dengan Kursi Tunggu - Dilengkapi Dengan WIFI untuk Pengunjung Sidang - Dilengkapi Dengan Kursi Roda Untuk Penyandang Disabilitas
		Ruang Tunggu Ramah Anak	Tidak Ada
		Ruang Tunggu PK, Bapas, Penasihat Hukum dan Pekerjaan Sosial	Ada
		Ruang Posbakum	Ada dibagian Lobby Depan
		Ruang Tahanan Pria	- Dilengkapi Dengan Toilet - Dilengkapi Dengan Perlengkapan Ibadah
		Ruang Tahanan Wanita	- Dilengkapi Dengan Toilet - Dilengkapi Dengan Perlengkapan Ibadah
		Ruang Mediasi	Ada
		Ruang Kesehatan	Ada
		Ruang Diversi	Ada
		Ruang Teleconference	Ada
		Ruang Laktasi	Ada
		Toilet Umum Pria	Ada
		Toilet Umum Wanita	Ada
		Toilet Khusus Difabel	Ada
		Mushallah	Menggunakan Masjid Pemkab

2. Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			B	RR	RB	
1.	Rumah Dinas Ketua	0				
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	0				
3.	Rumah Dinas Hakim	0				
4.	Rumah Dinas Panitera	0				
5.	Rumah Dinas Sekretaris	0				

3. Kendaraan Bermotor

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			B	RR	RB	
Kendaraan Bermotor Roda 4						
1.	Wuling Cortez	1	1			
2.	Mitsubishi XPander	1	1			Sewa
3.	Nissan X-Trail	3		3		Hibah Pemda
Kendaraan Bermotor Roda 2						
1.	Honda Vario	1	1			
2.	Kawasaki Trail	1	1			

4. Fasilitas Perkantoran

No	Uraian	Jumlah	Ket
1.	AC Split	6	Unit
2.	UPS	5	Unit
3.	PC	23	Unit
4.	Laptop	5	Unit
5.	Printer	6	Unit

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dukungan penerapan teknologi informasi yang dilakukan pada tahun 2022 antara lain pengadaan jaringan Internet *dedicated* 1:1

dengan *Bandwidth* sebesar 60 Mbps, Pengadaan Laptop bagi hakim dan Sewa Mesin Fotokopi guna mendukung *E-Court*.

- Dukungan Teknologi Informasi

No	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Jaringan	1	<i>Dedicated</i> 1:1 60Mbps, Fiber
2.	Server	2	1 (satu) Server Utama, 1 (satu) Server cadangan
3.	Rak Server	2	1 (satu) Server Utama, 1 (satu) Server cadangan
4.	UPS	1	Server SIP & perangkat komputer lainnya
5.	Komputer Jaringan Lainnya	2	
6.	Router	3	
7.	Hub	1	
8.	Network Cable Tester	1	

1. Implementasi E-Court

Penerapan Electronic Court atau sering dikenal dengan istilah E-Court pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah dimulai sejak tahun 2018. Pada tahun 2022 perkara yang didaftarkan melalui ecourt adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Daftar Melalui E-Court	Sepakat E-Court
1.	Gugatan/ Perlawanan/ Bantahan	45	21
2.	Permohonan	19	-
3.	Gugatan Sederhana	2	-

2. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Ditahun 2022 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengalami peningkatan jumlah perkara dari yang semula 1-500 perkara saat ini masuk kategori 501-1000 perkara. Untuk peringkat secara keseluruhan dari bulan Januari - Desember 2022 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berada di peringkat 9 dengan Total Nilai 961.98

No	Kategori	Nama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Nilai
3	500+2000	Pengadilan Negeri Kelas 1a	130.82	144.72	122.56	159.78	144.88	144.88	144.88	144.88	144.88	144.88	144.88
4	301+1000	Pengadilan Negeri Kelas 1a	145.18	145.18	122.08	157.24	145.18	145.18	145.18	145.18	145.18	145.18	145.18
5	301+1000	Pengadilan Negeri Kelas 1a	142.38	157.10	131.76	167.24	142.38	142.38	142.38	142.38	142.38	142.38	142.38
6	500+2000	Pengadilan Negeri Kelas 1a	146.53	152.08	141.98	147.51	146.53	146.53	146.53	146.53	146.53	146.53	146.53
7	500+2000	Pengadilan Negeri Kelas 1a	142.82	136.72	103.78	167.47	142.82	142.82	142.82	142.82	142.82	142.82	142.82
8	1-500	Pengadilan Negeri Kelas 1a	138.12	126.62	109.52	167.59	138.12	138.12	138.12	138.12	138.12	138.12	138.12
9	501-1000	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	141.74	135.21	133.69	167.34	141.74	141.74	141.74	141.74	141.74	141.74	141.74
10	+2000	Pengadilan Negeri Kelas 1a	145.37	149.54	121.07	148.19	145.37	145.37	145.37	145.37	145.37	145.37	145.37

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selalu berupaya untuk meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat. Berikut beberapa program yang dilakukan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat.

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Pada tahun 2022 telah dilakukan Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Asessor dari Pengadilan Tinggi Palembang. Dari Surveillance tersebut terdapat beberapa kekurangan yang ditemui dan kedepannya direkomendasikan untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Dari assessment yang dilakukan tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mendapatkan predikat A "Excellent".



B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah dilaksanakan pada tahun 2018 tepatnya bulan November 2018. Pelayanan Umum dan seluruh pelayanan di Kepaniteraan di jadikan satu pintu, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan akan dilayani dari awal hingga selesainya layanan di satu pintu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kepada masyarakat.

PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terdiri dari 10 meja pelayanan, terdiri atas :

- 1.Layanan PTSP Bagian Pidana
- 2.Layanan PTSP Bagian Perdata
- 3.Layanan PTSP Bagian Hukum
- 4.Layanan PTSP Bagian Umum
- 5.Layanan Meja E-Court
- 6.Layanan Meja Informasi
- 7.Layanan Meja Pengaduan
- 8.Layanan Meja Inzage
- 9.Layanan Kasir Perdata

PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai juga memiliki alat survey indeks kepuasan masyarakat dan survey indeks persepsi anti korupsi juga terdapat mesin antrian pelayanan. Terdapat ruang tamu terbuka bagi para pihak dan layanan posbakum untuk konsultasi hukum bagi para pencari keadilan.







C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melakukan beberapa inovasi. Adapun beberapa inovasi yang dilakukan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. ASDUMAS

Merupakan Layanan berbasis chat WhatsApp untuk mengajukan komplain atas kinerja atau perilaku ASN pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.



2. ASTASIKUM

Merupakan Layanan berbasis chat WhatsApp, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bekerja sama dengan Pos Bantuan Hukum (POBBAKUM) PN Pangkalan Balai yang dibantu APBN untuk menyediakan layanan Konsultasi Hukum.



3. SIAP - (SARANA INFORMASI ANJUNGAN PENGADILAN)

Merupakan Layanan Informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang diselenggarakan atas kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwasin. Layanan tersebut merupakan layanan publik yang beroperasi di OPI Mall Jakabaring Lantai 2.

The poster features the logo of Pengadilan Negeri Pangkalan Balai at the top left. The main title is "HAI SOBAT PENGADILAN" in green, followed by "PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI DENGAN BANGGA MEMPERKENALKAN KEPADA SOBAT PENGADILAN MENGENAI SIAP (SARANA INFORMASI ANJUNGAN PENGADILAN)". It announces a launch on Friday, November 11, 2022, at OPI Mall Jakabaring Lantai 2. The service will offer three public services: e-Court registration, EraTerang application, and e-Berpadu application. It includes a cartoon character with question marks and the slogan "AYO KUNJUNGI SIAP". The service hours are Tuesday and Friday, 11:00 - 16:00 WIB. Social media handles for @pn_pangkalanbalai and @pn_pkb are listed at the bottom.

4. E-MINATOR (Elektronik Permintaan Alat Tulis Kantor)

Merupakan inovasi yang dipergunakan untuk melakukan permintaan alat tulis kantor secara elektronik berbasis Google Form.

The screenshot shows a Google Form titled "Permintaan ATK PN Pangkalan Balai". The form includes a header with a yellow and pink background and a paperclip icon. The main text reads "Permintaan ATK PN Pangkalan Balai" and "Monggo dikun dengan samar dan teliti". Below this is a text input field for an email address, followed by a "Nama Anda" field with a sub-label "di mana lahir". There is also a "Jenis ATK" field. At the bottom, there is a "Sub Bagian Kerja" section with radio button options: KPA, KPA, KPA, KPA, KPA, and KPA.

5. VILADIFA (Video Layanan Difabel)

Merupakan video pelayanan bagi masyarakat umum dan pencari keadilan yang dilengkapi dengan Bahasa Isyarat mengenai Pendaftaran Perkara Gugatan dan Gugatan Sederhana melalui E-Court dan Prosedur Perkara Perdata Permohonan/Gugatan Voluntair Melalui E-Court yang dapat diakses melalui kanal Youtube Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.



BAB VI PENGAWASAN

Pengawasan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berpedoman kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan. Terdapat 2 jenis pengawasan yakni :

1. Pengawasan Melekat

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan.

2. Pengawasan Fungsional

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menindaklanjuti hal tersebut Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerbitkan surat keputusan Nomor : W6.U10/137/KP.04.6/III/2022 Tanggal : 2 Maret 2022 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Bidang Pengawasan
1.	Nofita Dwi Wahyuni, S.H.	Koordinator Pengawas Bidang
2.	Syarifa Yana, S.H., M.H.	Pidana
3.	Agewina, S.H., M.H.	Perdata & SIPP
4.	Hari Muktiyono, S.H.	Hukum
5.	Erwin Tri Surya Anandar, S.H.	Umum dan Keuangan & PTSP
6.	Ayu Cahyani Sirait, S.H., M.H.	Kepegawaian & Ortala, Perencanaan, TI dan Pelaporan

Dengan surat keputusan ini diharapkan pengawasan pada setiap bidang pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat berjalan dengan baik sehingga hasil dari pengawasan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan.

A. INTERNAL

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dilaksanakan secara rutin baik secara langsung yakni dengan cara melakukan pemeriksaan langsung maupun secara tidak langsung dengan cara melakukan pengujian atau penilaian atas laporan atau isi dokumen. Objek dari pengawasan yang dilakukan meliputi :

1. Manajemen Peradilan
 - a. Program kerja;
 - b. Pelaksanaan/Pencapaian Target;
 - c. Pengawasan dan Pembinaan;
 - d. Kendala dan hambatan;
 - e. Faktor-faktor pendukung;
 - f. Evaluasi kegiatan.
2. Administrasi Perkara
 - a. Prosedur penerimaan perkara;
 - b. Prosedur penerimaan permohonan banding;
 - c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi;
 - d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali;
 - e. Prosedur penerimaan permohonan grasi;
 - f. Keuangan perkara;
 - g. Pemberkasan perkara dan kearsipan;
 - h. Pelaporan;
3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

- a. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim;
 - b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
 - c. Minutasi perkara;
 - d. Pelaksanaan putusan (Eksekusi).
4. Administrasi Umum
- a. Kepegawaian;
 - b. Keuangan;
 - c. Inventaris;
 - d. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.
5. Kinerja Pelayanan Publik
- a. Pengelolaan manajemen;
 - b. Mekanisme pengawasan;
 - c. Kepemimpinan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan;
 - g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;
 - h. Tingkat pengaduan masyarakat.

Dari pengawasan yang dilakukan selama tahun 2021 terdapat berbagai temuan, lalu dilakukan klarifikasi oleh pimpinan objek pengawasan selanjutnya berbagai temuan tersebut dituangkan ke dalam laporan hasil pemeriksaan, untuk hal yang memerlukan adanya perbaikan maka Pimpinan objek pengawasan diminta untuk menandatangani kontrak kinerja bahwa ia bersedia untuk melakukan perbaikan dalam kurun waktu tertentu.

B. EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dilakukan dilakukan setiap bulan oleh pimpinan pengadilan yakni Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan melalui laporan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing hakim pengawas. Dari laporan pengawasan tersebut, pimpinan pengadilan dapat mengetahui kendala -kendala yang sedang dihadapi dalam melaksanakan tugas serta dapat menilai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas. Dari evaluasi pengawasan ini nantinya dapat dirumuskan solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada.



Rapat evaluasi hakim pengawas Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi pengadilan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada secara maksimal
2. Proses penyelenggaraan administrasi peradilan maupun administrasi umum telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), walaupun masih terdapat berbagai kekurangan karena terbatasnya sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya.
3. Seluruh kegiatan penyelenggaraan peradilan tidak terlepas dari pengawasan internal, Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Wakil Ketua dan serta jajaran Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

B. REKOMENDASI

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi penyelenggaraan peradilan, maka perlu secara bertahap diupayakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran, kenyamanan dan kualitas kinerja
2. Dengan volume perkara dan pekerjaan yang terus meningkat diharapkan adanya penambahan Hakim,

Pegawai dan Tenaga Honorer pada Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai

3. Agar dilakukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai baik teknis maupun non teknis agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik.

LAMPIRAN





SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 2876/SEK/OT.01.1/12/2022 Jakarta, 14 Desember 2022
Lampiran : Satu Set
Hal : Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022

Yth. 1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI
2. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan

di

Tempat

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan). Dihimbau kepada para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Satker Eselon I Mahkamah Agung RI menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari masing-masing Unit Eselon II di Bawahnya;
2. Pengadilan Tingkat Banding menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari masing-masing Pengadilan Tingkat Pertama di bawahnya;
3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 sesuai dengan *outline* terlampir;
4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 diserahkan kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* melalui email : renogevlap2@gmail.com pada minggu pertama bulan Februari 2023.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H.

Tembusan:
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.

Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor : 2876/SEK/OT.01.1/12/2022

Tanggal : 14 Desember 2022

OUTLINE LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengantar

Daftar isi

Bab I Pendahuluan

Bab II A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum/Agama/Miltun

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama
- Keadaan Perkara Tingkat Banding
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

B. Penyelesaian Perkara

- Jumlah sisa perkara yang diputus
- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu
- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK
- Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

- Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)
- Sidang keliling/pelayanan terpadu
- Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)

Bab III Sumber Daya Manusia

Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan

- Mutasi
- Promosi
- Pensiun
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yg telah mengikuti Diklat)

Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi

A. Pengelolaan Keuangan

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Bab V Peningkatan Pelayanan Publik

- Akreditasi Penjaminan Mutu
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Inovasi Pelayanan Publik

Bab VI Pengawasan

A. Internal

B. Evaluasi

BAB VII Penutup

A. Kesimpulan

B. Rekomendasi

Catatan: Outline Laporan Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan satker masing-masing

Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 2876/SEK/OT.01.1/12/2022
Tanggal : 14 Desember 2022

JADWAL PENYERAHAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	WAKTU	KEGIATAN	KET
1.	Januari Minggu Ketiga	<ul style="list-style-type: none">- Eselon II menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> ke Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Eselon I mengkompilasi Laporan Laporan Eselon II di Lingkungan Mahkamah Agung RI.- Laporan Pengadilan Tingkat Pertama telah diterima oleh Pengadilan Tingkat Banding.	
2.	Januari Minggu Keempat	<ul style="list-style-type: none">- Eselon I mengkompilasi laporan-laporan dari masing-masing Eselon II.- Pengadilan Tingkat Banding mengkompilasi laporan-laporan dari Pengadilan Tingkat Pertama dibawahnya.	
3.	Februari Minggu Pertama	<ul style="list-style-type: none">- Seluruh Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung Pusat mengirimkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Eselon I yang telah dikompilasi ke Badan Urusan Administrasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> melalui Biro perencanaan dan Organisasi lewat email renogevlap2@gmail.com.- Pengadilan Tingkat Banding mengirimkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang telah dikompilasi ke Badan Urusan Administrasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> kepada Biro Perencanaan dan Organisasi lewat email renogevlap2@gmail.com.	



Nomor : W6-U/4833/OT.01.2/XII/2022
Lampiran : -
Perihal : Penyusunan Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Tahun 2022

20 Desember 2022

Yth. Ketua Pengadilan Negeri
di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2876/SEK/OT.01.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 perihal tersebut pada pokok surat diatas, bersama ini kami minta kepada setiap Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang agar mengirimkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 dalam bentuk *hardcopy* ke Pengadilan Tinggi Palembang dan *softcopy* melalui *email* renprog.ang.ptplg@gmail.com paling lambat tanggal 16 Januari 2023. Mengingat pentingnya laporan tersebut, diharapkan dapat kami terima tepat waktu.

Demikian kami sampaikan dan untuk dilaksanakan.

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Dr. MOH EKA KARTIKA EM, S.H., M.Hum. P.
NIP. 19581110 198403 1 005

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di - Jakarta;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di - Jakarta.



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
NOMOR : W6-U10/1/KP.04.6/1/2022**

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN LKJIP /LAPTAH/ IKU/ RENSTRA
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan laporan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan ;
 - b. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu dilakukan perubahan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota ;
 - d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
 - 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG TIM PENYUSUNAN LKJIP/LAPTAH/IKU/RENSTRA PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.**
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ;
- KETIGA** : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bertugas menghimpun bahan-bahan tersebut ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada tanggal : 3 Januari 2022


KETUA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

SILVI ARIANI, S.H., M.H.
NIP. 19760929 200112 2 006

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
Nomor : W6-U10/1/KP.04.6/1/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan	Ket
1	2	3	4	5
1.	NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Pembina	
2.	YUSUF, S.H.	Panitera	Ketua Tim	
3.	ENDANG EFENDI, S.E., M.M.	Sekretaris	Sekretaris	
4.	KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota	
5.	A. HAIRUN YULASNI, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota	
6.	ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota	
7.	M. IMAN SEPTIAN, S.Ip.	Kasubag Perencanaan, IT, dan Pelaporan	Anggota	
8.	DWI INDAH ROSALINA, S.H., M.H.	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota	
9.	RAHMAT JUNIANSYAH	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota	

KETUA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI


SILVI ARIANI, S.H., M.H.
NIP. 19760929 200112 2 006

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 4,986,169,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			4,986,169,000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			4,976,169,000	
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan		4,976,169,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1066.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		5,000,000	
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah			5,000,000	
A	Penanggulangan Covid-19			5,000,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19			5,000,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengadaan APD/Alat Uji Medis/Rapid Tes/Vitamin/Masker	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		4,971,169,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,699,977,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3,699,977,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS			1,454,678,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	121,071,600	121,071,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	121,071,600	121,071,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,212,536,060	1,212,536,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS			32,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	28,425	28,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,400	2,000	
	- Belanja Pembulatan gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,400	2,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			100,174,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	85,782,074	85,782,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri (gaji ke 13)	1.0 BLN	7,196,400	7,196,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	7,196,000	7,196,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS			28,683,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. anak PNS	1.0 THN	24,063,254	24,063,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,310,000	2,310,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,310,000	2,310,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS			28,944,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,412,000	2,412,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,412,000	2,412,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	24,120,000	24,120,000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS			1,259,218,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	78,684,000	78,684,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	78,684,000	78,684,000	
	- Belanja Tunj Fungsional PNS	1.0 THN	1,101,850,000	1,101,850,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 4,986,169,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			182,814,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	158,374,312	158,374,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	12,220,800	12,220,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	12,220,800	12,220,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			93,812,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	93,812,616	93,812,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			421,977,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	421,977,600	421,977,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			129,645,000	RM
	- Belanja Tunj Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	116,565,000	116,565,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,271,192,000	
A	<i>Keperluan Perkantoran Sehari-hari</i>			399,808,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu)			361,257,000	RM
	- Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	3,683,000	44,196,000	
	- Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	3,683,000	88,392,000	
	- Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN]	60.0 OB	3,348,000	200,880,000	
	- THR Sopir [1 ORG x 1 BLN]	1.0 OB	3,683,000	3,683,000	
	- THR Satpam [2 ORG x 1 BLN]	2.0 OB	3,683,000	7,366,000	
	- THR Pramubakti [5 ORG x 1 BLN]	5.0 OB	3,348,000	16,740,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.160-Sekayu)			11,551,000	RM
	- Biaya keperluan sehari-hari perkantoran lainnya (Spandul, Banner, Penjilitan, Plakat, Bingkai)	1.0 THN	11,551,000	11,551,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.160-Sekayu)			27,000,000	RM
	- Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran (pegawai 30 orang)	30.0 OB	900,000	27,000,000	
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			279,630,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu)			189,000,000	RM
	- Lisensi Vidio Conference	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Langganan Internet	12.0 BLN	15,500,000	186,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.160-Sekayu)			11,630,000	RM
	- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	969,167	11,630,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.160-Sekayu)			60,000,000	RM
	- Langganan Listrik	12.0 BLN	5,000,000	60,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.4,986,169,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.160-Sekayu) - Langganan telpon	12.0 BLN	750,000	9,000,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.160-Sekayu) - Langganan Air	12.0 BLN	500,000	6,000,000	RM
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.160-Sekayu) - Langganan Web Hosting	1.0 THN	4,000,000	4,000,000	RM
C	<i>Pemeliharaan Kantor</i>			324,734,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.160-Sekayu) - Pemeliharaan gedung dan Bangunan	2496.0 M2	76,300	190,444,000	RM
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.160-Sekayu) - Tambahan BBM Sewa Roda 4 - Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) [1 UNIT x 1 THN] - Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) [2 UNIT x 1 THN] - Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pinjam Pakai - Perawatan Komputer [20 UNIT x 1 THN] - Perawatan Printer [4 UNIT x 1 THN] - Perawatan AC [6 Unit x 1 THN] - Perawatan Laptop [5 UNIT x 1 THN]	1.0 UT 1.0 UT 2.0 UT 3.0 UNIT 20.0 UT 4.0 UT 6.0 UT 5.0 UT	18,000,000 20,000,000 3,000,000 25,000,000 219,000 690,000 750,000 730,000	18,000,000 20,000,000 6,000,000 75,000,000 4,380,000 2,760,000 4,500,000 3,650,000	RM
D	<i>Pembayaran Teknis Pelayanan Operasional Kantor</i>			72,040,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu) - Pakaian Dinas Honorer/pegawai tidak tetap [8 ORG x 1 STEL] - Pakaian Dinas Pegawai/Non Hakim [33 ORG x 1 STEL]	8.0 STEL 33.0 STEL	500,000 600,000	4,000,000 19,800,000	RM
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.160-Sekayu) - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium Pengelola Keuangan Penerimaan PNBPN [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN] - Honorarium Bendahara [1 OPRG x 12 BLN] - Honorarium Pejabat penguji SPP dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB 12.0 OB 24.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB	650,000 300,000 450,000 770,000 650,000 750,000	7,800,000 3,600,000 10,800,000 9,240,000 7,800,000 9,000,000	RM
E	<i>HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM</i>			136,080,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.160-Sekayu) - Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim [9 org x 12 bln]	108.0 OB	1,260,000	136,080,000	RM
F	<i>PENCEGAHAN COVID</i>			5,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 4,986,169,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.160-Sekayu)			5,000,000	RM
H	- Penyemprotan Disinfektan	1.0 KEG	5,000,000	5,000,000	
	Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding			35,000,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.160-Sekayu)			5,600,000	RM
	- Swab [4 ORG x 7 KEG]	28.0 OK	200,000	5,600,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu)			29,400,000	RM
	- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 7 KEG]	56.0 OH	300,000	16,800,000	
	- Transportasi [4 ORG x 1 PP x 7 KEG]	28.0 OK	100,000	2,800,000	
	- Penginapan [4 ORG x 1 HARI x 7 KEG]	28.0 OH	350,000	9,800,000	
I	Konsultasi, Rekonsiliasi SIMAK, SPM, Revisi Anggaran ke KPPN/KPKNL/KANWIL/DJA			18,900,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu)			18,900,000	RM
	- Transportasi [2 ORG x 1 PP x 9 KEG]	18.0 OK	100,000	1,800,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 9 KEG]	36.0 OH	300,000	10,800,000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 9 KEG]	18.0 OH	350,000	6,300,000	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			10,000,000	
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUASIN	2.0 Unit		10,000,000	
1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	2.0 Unit		10,000,000	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			10,000,000	
A	Pengadaan Alat Pengolah Data			10,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.160-Sekayu)			10,000,000	RM
	- Printer	2.0 UNIT	5,000,000	10,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 28 Desember 2021


Endang Efendi
 NIP.198409132009041002

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 73,905,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			73,905,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			73,905,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	120.0 Perkara		49,905,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1049.BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	120.0 Perkara		49,905,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			9,996,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			9,996,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu)			996,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	120.0 PKR	8,300	996,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.160-Sekayu)			9,000,000	RM
	- Alat Tulis Kantor	120.0 PKR	75,000	9,000,000	
052	Penetapan hari sidang			14,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			14,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			14,000,000	RM
	- Pengiriman Penetapan Hari Sidang (Kejaksaan)	200.0 OK	70,000	14,000,000	
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.			5,270,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			5,270,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			1,000,000	RM
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	50.0 OK	20,000	1,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			4,270,000	RM
	- Pengiriman surat penahanan dan Perpanjangan Penahanan	61.0 OK	70,000	4,270,000	
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			15,500,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			15,500,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			1,500,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	50.0 OK	30,000	1,500,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			14,000,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan (Pegawai)	200.0 OK	70,000	14,000,000	
056	Minutasi/Upaya hukum			3,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			3,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu)			3,000,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	120.0 PKR	25,000	3,000,000	
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama			1,005,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,005,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp.73,905,000

Halaman: 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			300,000	RM
	- Pengiriman Salinan Putusan	10.0 PKR	30,000	300,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			705,000	RM
	- Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	5.0 PKR	70,000	350,000	
	- Pemberitahuan Putusan Banding	5.0 PKR	71,000	355,000	
058	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama			1,134,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,134,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			400,000	RM
	- Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	5.0 PKR	80,000	400,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			734,000	RM
	- Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	6.0 PKR	64,000	384,000	
	- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	5.0 PKR	70,000	350,000	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUASIN	240.0 Orang		24,000,000	
1049.QBA.032	Pos Bantuan Hukum	240.0 Orang		24,000,000	
051	Pos Bantuan Hukum			24,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			24,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.160-Sekayu)			24,000,000	RM
	- Honor Advokat Piket [1 ORG x 2 Jam x 10 Hari x 12 BLN	240.0 OJ	100,000	24,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 28 Desember 2021

 Endang Efendi
 NIP 19640913009041002

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022 REVISI KE-7

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 9,319,369,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			9,319,369,000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			5,100,569,000	
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan		5,100,569,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1066.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		5,000,000	
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah			5,000,000	
A	Penanggulangan Covid-19			5,000,000	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.160-Sekayu)			5,000,000	RM
	- Pengadaan APD/Alat UjiMedis/Rapid Tes/Vitamin/Masker	1.0 PKT	5,000,000	5,000,000	
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		5,095,569,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,699,977,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3,699,977,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.160-Sekayu)			1,454,678,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	121,071,600	121,071,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	121,071,600	121,071,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,212,536,060	1,212,536,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.160-Sekayu)			32,000	RM
	- Belanja pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	28,425	28,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,400	2,000	
	- Belanja Pembulatan gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,400	2,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.160-Sekayu)			100,174,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	85,782,074	85,782,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri (gaji ke 13)	1.0 BLN	7,196,400	7,196,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	7,196,000	7,196,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.160-Sekayu)			28,683,000	RM
	- Belanja Tunj. anak PNS	1.0 THN	24,063,254	24,063,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,310,000	2,310,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,310,000	2,310,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.160-Sekayu)			28,944,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,412,000	2,412,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,412,000	2,412,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	24,120,000	24,120,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022 REVISI KE-7

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 9,319,369,000

Halaman: 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			1,259,218,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	78,684,000	78,684,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	78,684,000	78,684,000	
	- Belanja Tunj Fungsional PNS	1.0 THN	1,101,850,000	1,101,850,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			182,814,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	158,374,312	158,374,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	12,220,800	12,220,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	12,220,800	12,220,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			93,812,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	93,812,616	93,812,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			421,977,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	421,977,600	421,977,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.160-Sekayu)			129,645,000	RM
	- Belanja Tunj Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	116,565,000	116,565,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,395,592,000	
A	<i>Keperluan Perkantoran Sehari-hari</i>			<i>476,102,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu)			361,257,000	RM
	- Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	3,683,000	44,196,000	
	- Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	3,683,000	88,392,000	
	- Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN]	60.0 OB	3,348,000	200,880,000	
	- THR Sopir [1 ORG x 1 BLN]	1.0 OB	3,683,000	3,683,000	
	- THR Satpam [2 ORG x 1 BLN]	2.0 OB	3,683,000	7,366,000	
	- THR Pramubakti [5 ORG x 1 BLN]	5.0 OB	3,348,000	16,740,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.160-Sekayu)			75,995,000	RM
	- Biaya keperluan sehari-hari perkantoran lainnya (Spandul, Banner, Penjilitan, Plakat, Bingkai)	1.0 THN	75,995,000	75,995,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.160-Sekayu)			38,850,000	RM
	- Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran (pegawai 30 orang)	30.0 OB	1,295,000	38,850,000	
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>402,800,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu)			188,670,000	RM
	- Lisensi Vidio Conference	1.0 THN	2,670,000	2,670,000	
	- Langganan Internet	12.0 BLN	15,500,000	186,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022 REVISI KE-7

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 9,319,369,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.160-Sekayu)			11,630,000	RM
	- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	969,167	11,630,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.160-Sekayu)			184,400,000	RM
	- Langganan Listrik	12.0 BLN	15,366,700	184,400,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.160-Sekayu)			9,000,000	RM
	- Langganan telpon	12.0 BLN	750,000	9,000,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.160-Sekayu)			6,000,000	RM
	- Langganan Air	12.0 BLN	500,000	6,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.160-Sekayu)			3,100,000	RM
	- Langganan Web Hosting	1.0 THN	3,100,000	3,100,000	
C	<i>Pemeliharaan Kantor</i>			248,470,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.160-Sekayu)			124,800,000	RM
	- Pemeliharaan gedung dan Bangunan	2496.0 M2	50,000	124,800,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.160-Sekayu)			123,670,000	RM
	- Tambahan BBM Sewa Roda 4	1.0 UT	18,000,000	18,000,000	
	- Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) [1 UNIT x 1 THN]	1.0 UT	20,000,000	20,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) [2 UNIT x 1 THN]	2.0 UT	3,000,000	6,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pinjam Pakai	3.0 UNIT	25,000,000	75,000,000	
	- Perawatan Komputer [20 UNIT x 1 THN]	20.0 UT	5,000	100,000	
	- Perawatan Printer [4 UNIT x 1 THN]	4.0 UT	442,500	1,770,000	
	- Perawatan AC [6 Unit x 1 THN]	6.0 UT	450,000	2,700,000	
	- Perawatan Laptop [5 UNIT x 1 THN]	5.0 UT	20,000	100,000	
D	<i>Pembayaran Teknis Pelayanan Operasional Kantor</i>			73,240,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu)			25,000,000	RM
	- Pakaian Dinas Honorer/pegawai tidak tetap [8 ORG x 1 STEL]	8.0 STEL	500,000	4,000,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai [35 ORG x 1 STEL]	35.0 STEL	600,000	21,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022 REVISI KE-7

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 9,319,369,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.160-Sekayu)			48,240,000	RM
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	650,000	7,800,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan Penerimaan PNPB [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
	- Honorarium Bendahara [1 OPRG x 12 BLN]	12.0 OB	770,000	9,240,000	
	- Honorarium Pejabat penguji SPP dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	650,000	7,800,000	
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	750,000	9,000,000	
E	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM			136,080,000	
522141	Belanja Sewa (KPPN.160-Sekayu)			136,080,000	RM
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim [9 org x 12 bln]	108.0 OB	1,260,000	136,080,000	
F	FENCEGAHAN COVID			5,000,000	RM
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.160-Sekayu)			5,000,000	
	- Penyemprotan Disinfektan	1.0 KEG	5,000,000	5,000,000	
H	Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding			46,100,000	RM
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 (KPPN.160-Sekayu)			5,600,000	
	- Swab [4 ORG x 7 KEG]	28.0 OK	200,000	5,600,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu)			40,500,000	
	- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 10 KEG]	80.0 OH	300,000	24,000,000	
	- Transportasi [4 ORG x 1 PP x 10 KEG]	40.0 OK	205,000	8,200,000	
	- Penginapan [4 ORG x 1 HARI x 10 KEG]	40.0 OH	207,500	8,300,000	
I	Konsultasi, Rekonsiliasi SIMAK, SPM, Revisi Anggaran ke KPPN/KPKNL/KANWIL/DJA			7,800,000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu)			7,800,000	
	- Transportasi [2 ORG x 1 PP x 5 KEG]	10.0 OK	80,000	800,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 5 KEG]	20.0 OH	300,000	6,000,000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 5 KEG]	10.0 OH	100,000	1,000,000	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			4,218,800,000	RM
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUASIN	3.0 Unit		4,218,800,000	
1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	2.0 Unit		10,000,000	
052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			10,000,000	
A	Pengadaan Alat Pengolah Data			10,000,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.160-Sekayu)			10,000,000	
	- Printer	2.0 UNIT	5,000,000	10,000,000	
1071.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.0 Unit		4,208,800,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022 REVISI KE-7

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 9,319,369,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			4,208,800,000	
A	Finishing Gedung dan Sarling Kantor			4,208,800,000	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.160-Sekayu)			4,208,800,000	RM
	- Fisik	2612.0 m2	1,509,572	3,943,002,000	
	- Perencana	1.0 keg	85,800,000	85,800,000	
	- Pengawas	1.0 keg	100,000,000	100,000,000	
	- Pengelola Kegiatan	1.0 keg	79,998,000	79,998,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 30 Desember 2022



ENDANG EFFENDI, S.E., M.M.
 NIP 198409132009041002

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022 REVISI KE-2

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 136,228,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			136,228,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			136,228,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	259.0 Perkara		112,228,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1049.BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	259.0 Perkara		112,228,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			27,195,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			27,195,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu)			1,295,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	259.0 PKR	5,000	1,295,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.160-Sekayu)			25,900,000	RM
	- Alat Tulis Kantor	259.0 PKR	100,000	25,900,000	
052	Penetapan hari sidang			22,500,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			22,500,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			22,500,000	RM
	- Pengiriman Penetapan Hari Sidang (Kejaksaan)	300.0 OK	75,000	22,500,000	
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.			31,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			31,000,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			1,000,000	RM
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	50.0 OK	20,000	1,000,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			30,000,000	RM
	- Pengiriman surat penahanan dan Perpanjangan Penahanan	300.0 OK	100,000	30,000,000	
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			15,500,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			15,500,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			1,500,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	50.0 OK	30,000	1,500,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			14,000,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan (Pegawai)	200.0 OK	70,000	14,000,000	
056	Minutasi/Upaya hukum			12,173,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			12,173,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu)			12,173,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	259.0 PKR	47,000	12,173,000	
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama			1,810,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,810,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022 REVISI KE-2

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 ALOKASI Rp. 136,228,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			300,000	RM
	- Pengiriman Salinan Putusan	10.0 PKR	30,000	300,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			1,510,000	RM
	- Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	10.0 PKR	75,000	750,000	
	- Pemberitahuan Putusan Banding	10.0 PKR	76,000	760,000	
058	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama			2,050,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,050,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			400,000	RM
	- Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	5.0 PKR	80,000	400,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			1,650,000	RM
	- Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	10.0 PKR	75,000	750,000	
	- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	10.0 PKR	90,000	900,000	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line] Lokasi : KAB. BANYUASIN	240.0 Orang		24,000,000	
1049.QBA.032	Pos Bantuan Hukum	240.0 Orang		24,000,000	
051	Pos Bantuan Hukum			24,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			24,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.160-Sekayu)			24,000,000	RM
	- Honor Advokat Piket [1 ORG x 2 Jam x 10 Hari x 12 BLN	240.0 OJ	100,000	24,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

Pangkalan Balai, 30 Desember 2022


Endang Efendi
 NIP 198409132009041002



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
NOMOR : W6-U10/141/KP.04.6 /IV/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS SIPP
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk Penyegaran di Lingkungan Kerja pengadilan Negeri pangkalan Balai, maka dipandang perlu untuk dilakukannya rooling penunjukkan Hakim SIPP yang baru;
2. Bahwa perlu ditunjuk Hakim Pengawas SIPP pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
3. Bahwa yang namanya tersebut dalam Daftar Lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : W6-U10/91/KP.04.6/11/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas SIPP pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- Kedua** : Memutuskan Hakim Pengawas SIPP pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran ini;
- Ketiga** : Memerintahkan kepada nama-nama Hakim Pengawas untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;
- Keempat** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 11 April 2022

**KETUA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

SILVIARIANI, S.H., M.H.
NIP. 19760929 200112 2 006

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
Nomor : W6-U10/141/KP.04.6 /IV/2022
Tanggal : 11 April 2022

TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS SIPP
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	DIANGKAT DALAM JABATAN
AGEWINA, S.H., M.H. NIP. 19880521 201712 2 001	Penata Muda TK. 1/ (III/b)	HAKIM PENGAWAS TIM SIPP

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 11 April 2022


KETUA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

SILVI ARIANI, S.H., M.H.
NIP. 19760929 200112 2 006



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NEGERI PANGKALAN BALAI
NOMOR : W6-U10/137/KP.04.6/III/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN
KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang** :
- a. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 67/KMA/SK/III/2022 tentang Pola Promosi dan Mutasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk dilakukannya penunjukan Hakim bidang Kepaniteraan dan kesekretariatan yang baru;
 - b. Untuk Kelancaran dan terkontrol nya Administrasi kantor Bahwa perlu ditunjuk Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
 - c. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - 2. Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
 - 3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
 - 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : W6-U10/90/KP.04.6/II/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- Kedua** : Menetapkan Susunan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang baru, sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran ini;
- Ketiga** : Memerintahkan kepada nama-nama Hakim Pengawas untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;
- Keenam** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada tanggal : 28 Maret 2022

KETUA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



SILVI ARIANI, SH., M.H.
NIP. 19760929 200112 2 006

DAFTAR LAMPIRAN

NOMOR : W6-U10/137/KP.04.6/III/2022

TANGGAL : 28 Maret 2022

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H. NIP. 19781125 200212 2 002	PEMBINA / (IV/a)	KOORDINATOR PENGAWAS BIDANG
2.	HARI MUKTIYONO, S.H. NIP. 19890901 201712 1 007	PENATA MUDA / (III/a)	HAKIM PENGAWAS BIDANG HUKUM
3.	SYARIFA YANA, S.H. NIP. 19870115 201712 2 001	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN PIDANA
4.	AGEWINA, S.H. NIP. 19880521 201712 2 001	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN PERDATA
5.	AYU CAHYANI SIRAIT, S.H. NIP. 19930604 201712 2 002	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	1. HAKIM PENGAWAS BIDANG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN 2. HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
6.	ERWIN TRI SURYA ANANDAR, S.H. NIP. 19900220 201712 1 006		1. HAKIM PENGAWAS BIDANG UMUM DAN KEUANGAN 2. HAKIM PENGAWAS PTSP

KETUA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI


SILVI ARIANI, SH., M.H.
NIP. 19760929 200112 2 006



**PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 61/DJU/SK/OT01.3/4/2022**

TENTANG

**NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN NEGERI KELAS IB DAN II TAHUN ANGGARAN 2021**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang : }
Mengingat : } dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TENTANG NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PADA
PENGADILAN NEGERI KELAS IB DAN II TAHUN ANGGARAN
2021.

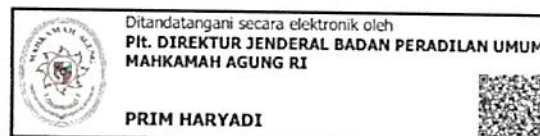
KESATU : Menetapkan nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri
kelas IB dan II untuk Tahun Anggaran 2021 berdasarkan rapat
Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum sebagaimana terlampir dalam
Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersifat mutlak dan
tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 April 2022



Kepada :

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 61/DJU/SK/OT01.3/4/2022
TANGGAL 4 APRIL 2022

NO.	NAMA PENGADILAN	KELAS	NILAI AKREDITASI SEBELUMNYA	NILAI AKREDITASI 2021	PREDIKAT
1 s/d 138	dst.				
139	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	II	695	705	A
140 s/d 322	dst.				


 Ditandatangani secara elektronik oleh
PI. DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI
PRIM HARYADI
